Department of Digital Business
Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)
Homepage: https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS
Vol. 4 No. 3 (2025) pp: 1721-1729
P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Upah Riil Terhadap Pengangguran Struktural di Kabupaten/ Kota Provinsi di Sumatera Barat Periode 2021-2023

Fitri Yani[1], Rini Elvira[2], Yuwarman Mansur[3], Sofia Ridha[4]
[123]Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
[4]Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
[1]fitriyanicng@gmail.com, [2]rinielvira@uinbukittinggi.ac.id, [3]mansuryuwarman@gmail.com, [4]sofiaridha@uinbukittinggi.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingginya pengangguran struktural di Provinsi Sumatera Barat meskipun upah riil mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Upah riil mencerminkan daya beli pekerja, sementara pengangguran struktural adalah pengangguran yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara keahlian dan kebutuhan pasar. Penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah upah riil berpengaruh terhadap pengangguran struktural dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat periode 2021–2023. Metode penelitian kuantitatif eksplanatori dengan data sekunder sebanyak 57 data selama 3 tahun (2021-2023). Teknik analisa yang digunakan meliputi uji normalitas, uji homogenitas, uji linearitas, model regresi linear sederhana , uji hipotesis menggunakan uji t serta uji koefisien determinasi/ R Square dengan bantuan SPSS 21. Hasil penelitian menunjukkan upah riil berpengaruh terhadap pengangguran struktural dengan nilai signifikan 0,008 < 0,05, yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Nilai R-Square sebesar 0,121 menunjukkan bahwa 12,1% variasi pengangguran struktural dijelaskan oleh upah riil, sementara 87,9 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini, seperti tingkat pendidikan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kemajuan teknologi. Hal ini berarti upah riil naik, maka pengangguran struktural menjadi turun, begitupun sebaliknya. Temuan ini memberikan implikasi bahwa kebijakan peningkatan upah riil dapat menjadi instrumen untuk menekan pengangguran struktural di Sumatera Barat.

Kata kunci: Upah Riil, Pengangguran Struktural, Regresi Linier Sederhana

1. Latar Belakang

Ilmu ekonomi makro merupakan cabang ekonomi yang mengkaji dinamika keseluruhan aktivitas perekonomian, dengan penekanan pada faktor-faktor yang memengaruhi kestabilan ekonomi nasional maupun global [1]. Salah satu isu sentral dalam kajian ini adalah pengangguran, yang menjadi indikator penting dalam menilai kinerja ekonomi. Berdasarkan definisi dari Badan Pusat Statistik (2024), pengangguran merujuk pada individu yang tidak memiliki pekerjaan namun sedang aktif mencari pekerjaan, atau mereka yang telah memperoleh pekerjaan tetapi belum mulai bekerja[2]. Di dalam fenomena pengangguran terdapat beberapa kategori, salah satunya adalah pengangguran struktural. Jenis pengangguran ini muncul ketika terdapat ketimpangan antara keahlian yang dimiliki oleh tenaga kerja dengan kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan oleh sektor industri yang tersedia [3].

Pengangguran struktural merupakan jenis pengangguran yang muncul ketika Dalam konteks tersebut, pekerja yang sebelumnya memiliki keahlian di sektor yang mengalami penurunan permintaan menjadi tidak relevan lagi di pasar kerja yang baru. Akibatnya, mereka kesulitan memperoleh pekerjaan baru tanpa melalui proses reskilling atau pendidikan lanjutan yang sesuai dengan kebutuhan sektor yang tengah berkembang [4]. Berbeda dengan bentuk pengangguran lainnya yang bersifat temporer, pengangguran struktural cenderung bersifat jangka panjang dan kompleks, serta memerlukan intervensi kebijakan yang terintegrasi dan berjangka menengah hingga panjang [5].

Menghadapi tantangan ini, upaya penanggulangan pengangguran struktural tidak dapat dilepaskan dari penyediaan program pelatihan ulang yang terstruktur, reformasi dalam sistem pendidikan, serta penyesuaian kurikulum agar selaras dengan tuntutan kompetensi di dunia industri yang terus berubah. Dalam hal ini, sinergi antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan, lembaga pendidikan sebagai penyedia keterampilan, serta pelaku dunia usaha sebagai pengguna tenaga kerja, menjadi kunci dalam menciptakan tenaga kerja yang tanggap dan fleksibel terhadap dinamika pasar. Tanpa adanya upaya kolaboratif yang serius, maka konsekuensi jangka panjangnya adalah

stagnasi pertumbuhan ekonomi akibat semakin banyaknya penduduk usia produktif yang tidak dapat terserap dalam sektor-sektor kerja yang modern dan kompetitif [6].

Lebih lanjut, BPS menjelaskan bahwa pengangguran struktural terjadi ketika tenaga kerja tidak mampu memenuhi kualifikasi atau persyaratan yang ditetapkan oleh pihak pemberi kerja [7]. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh perubahan teknologi, dinamika industri, atau ketidaksesuaian sistem pendidikan dan pelatihan dengan tuntutan pasar kerja. Salah satu indikator penting dari pengangguran struktural adalah jumlah individu yang tidak terserap dalam dunia kerja akibat mismatch keterampilan [8]. Dalam konteks ini, salah satu variabel yang diduga memiliki pengaruh signifikan terhadap pengangguran struktural adalah upah riil. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan literatur terkait kajian yang secara spesifik menelaah hubungan antara upah riil dan pengangguran struktural. Berdasarkan hasil telaah pustaka terhadap sekitar 200 jurnal ilmiah menggunakan perangkat lunak VOSviewer, ditemukan bahwa perhatian akademik terhadap isu pengaruh upah riil terhadap pengangguran struktural masih relatif minim dibandingkan dengan variabel lain. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan mengkaji secara mendalam bagaimana fluktuasi upah riil dapat memengaruhi tingkat pengangguran struktural, sekaligus memberikan kontribusi teoretis dan empiris dalam pengembangan kebijakan ketenagakerjaan.

Upah riil, sebagaimana dijelaskan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), merupakan nilai upah yang diterima oleh pekerja setelah mempertimbangkan dampak inflasi terhadap daya beli. Dalam konteks penelitian ini, upah riil dihitung dengan mengombinasikan data upah nominal dan indeks harga konsumen sebagai tolok ukur perubahan harga barang dan jasa (BPS, 2024). Konsep ini berperan penting dalam memahami keputusan partisipasi angkatan kerja, sebagaimana dijelaskan dalam teori upah efisiensi. Menurut teori tersebut, tingkat upah riil dapat memengaruhi pilihan individu untuk bekerja atau tidak. Ketika upah riil terlalu rendah dan tidak mencukupi kebutuhan hidup minimum, maka insentif untuk bekerja menurun karena pekerja merasa imbalan yang diperoleh tidak sepadan dengan energi dan waktu yang dikeluarkan. Sebaliknya, apabila upah riil terlalu tinggi tanpa dibarengi dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja, perusahaan dapat merespons dengan mengurangi jumlah tenaga kerja untuk menjaga efisiensi biaya [9].

Upah riil merepresentasikan kapasitas aktual dari pendapatan nominal yang diterima oleh pekerja dalam memperoleh barang dan jasa, setelah disesuaikan dengan perubahan tingkat harga atau inflasi. Dengan demikian, konsep ini mencerminkan daya beli riil yang dimiliki individu, bukan sekadar jumlah uang yang diperoleh. Ketika terjadi kenaikan inflasi namun upah nominal tidak mengalami penyesuaian yang proporsional, maka nilai riil dari pendapatan tersebut menurun, menyebabkan penurunan daya beli yang secara langsung berdampak pada kesejahteraan pekerja. Oleh sebab itu, upah riil merupakan indikator ekonomi yang sangat krusial dalam mengevaluasi tingkat kesejahteraan tenaga kerja. Sebagai ilustrasi, seorang pekerja dengan gaji tetap sebesar Rp5 juta per bulan akan mengalami kondisi daya beli yang sangat berbeda apabila inflasi berada pada tingkat 2% dibandingkan dengan situasi ketika inflasi melonjak hingga 10% [10].

Lebih lanjut, dinamika upah riil tidak hanya berdampak pada aspek konsumsi, tetapi juga berkaitan erat dengan produktivitas tenaga kerja. Peningkatan upah riil umumnya akan memicu peningkatan motivasi kerja, memperbesar kapasitas konsumsi rumah tangga, serta mendorong pertumbuhan permintaan domestik yang lebih stabil. Dalam konteks makroekonomi, hal ini dapat menciptakan efek multiplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, penurunan upah riil kerap kali dikaitkan dengan penurunan standar hidup, meningkatnya beban psikologis, serta potensi munculnya ketidakpuasan sosial di kalangan buruh. Oleh karena itu, baik pemerintah maupun pihak pengusaha memiliki tanggung jawab untuk secara cermat mempertimbangkan perkembangan upah riil dalam menyusun kebijakan pengupahan yang seimbang. Pendekatan ini penting agar tercapai harmonisasi antara tuntutan produktivitas ekonomi dan kebutuhan dasar akan kesejahteraan pekerja [11].

Menurut penafsiran M. Quraish Shihab, Islam menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi ekonomi, termasuk larangan mengambil hak orang lain, yang dalam konteks ketenagakerjaan dapat dikaitkan dengan kewajiban memberikan upah yang layak dan adil kepada pekerja. Ketimpangan antara upah riil dan biaya hidup merupakan persoalan yang kerap muncul di wilayah dengan kesenjangan ekonomi yang tajam, salah satunya adalah Provinsi Sumatera Barat. Meskipun daerah ini memiliki 19 kabupaten/kota dengan potensi ekonomi yang signifikan, tantangan dalam mengatasi pengangguran struktural masih terus berlangsung.

Data yang dihimpun oleh BPS mengindikasikan adanya penurunan angka pengangguran struktural di Sumatera Barat dari 55.597 jiwa pada tahun 2021 menjadi 40.817 jiwa pada tahun 2023. Meskipun angka tersebut menunjukkan tren yang menurun, persoalan pengangguran tetap menjadi isu strategis yang perlu mendapat perhatian serius. Penurunan ini memunculkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang berkontribusi, salah satunya adalah pengaruh fluktuasi upah riil. Oleh karena itu, pengamatan lebih lanjut terhadap dinamika

DOI: https://doi.org/ 10.31004/riggs.v4i3.2211
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

pengangguran struktural di setiap kabupaten/kota selama periode 2021–2023 menjadi penting dalam upaya merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih tepat sasaran :

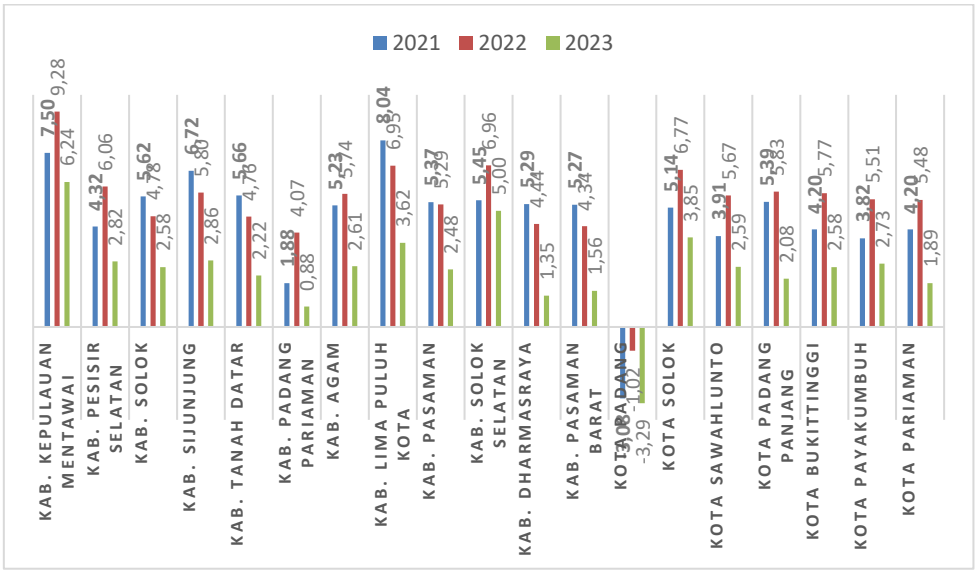

Gambar 1. Grafik Pengangguran Struktural Menurut Kabupaten / Kota Provinsi Sumatera Barat Periode 2021-2023 (Persen)

Merujuk pada Gambar 1, tren jumlah pengangguran struktural di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2021 hingga 2023 menunjukkan pola yang fluktuatif. Setelah mengalami peningkatan pada tahun 2022, angka pengangguran struktural kembali menurun pada tahun 2023. Di antara seluruh wilayah administrasi, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kabupaten Solok Selatan tercatat sebagai daerah dengan jumlah pengangguran struktural tertinggi selama periode tersebut. Sebaliknya, Kota Padang secara konsisten menunjukkan angka pertumbuhan negatif dalam pengangguran struktural, sementara Kabupaten Padang Pariaman mencatat angka yang relatif rendah. Ketimpangan ini dapat dikaitkan dengan disparitas tingkat upah riil di masing-masing daerah, yang pada beberapa kasus tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar masyarakat pekerja.

Upah riil yang dihitung berdasarkan kombinasi antara upah nominal dan indeks harga konsumen menjadi indikator penting dalam menganalisis keseimbangan antara penghasilan pekerja dan biaya hidup aktual yang mereka hadapi. Data hasil olahan dari BPS yang mencakup variabel upah nominal dan indeks harga konsumen menunjukkan bahwa tren upah riil di Sumatera Barat juga mengalami dinamika yang tidak stabil sepanjang periode pengamatan. Terdapat penurunan signifikan pada tahun 2022, yang kemudian diikuti oleh sedikit kenaikan pada tahun 2023. Perubahan ini memberikan pengaruh langsung terhadap kemampuan konsumsi rumah tangga, kesejahteraan tenaga kerja, serta struktur pasar tenaga kerja secara keseluruhan di provinsi ini :

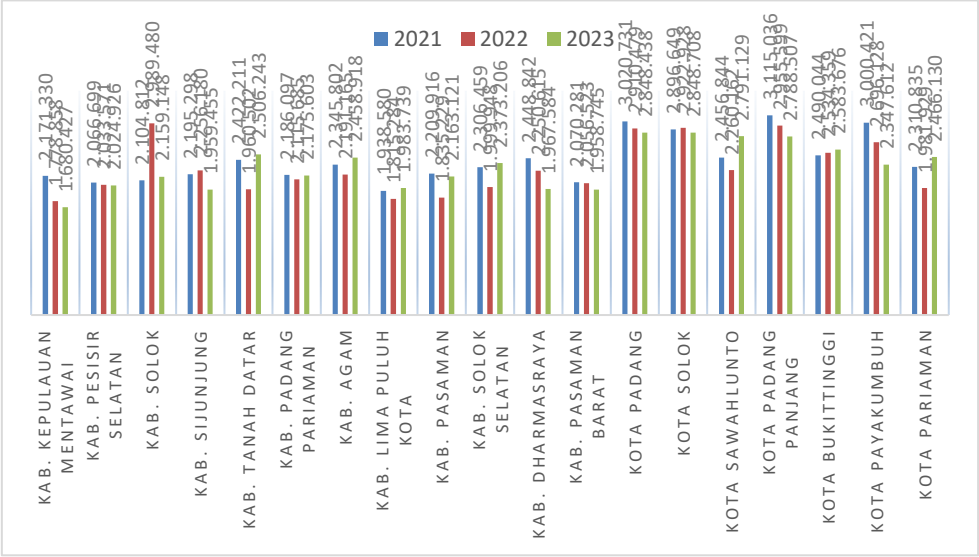

Gambar 2. Grafik Perkembangan Upah Riil Menurut Kabupaten / Kota Provinsi Sumatera Barat Periode 2021-2023 (Rupiah

DOI: https://doi.org/ 10.31004/riggs.v4i3.2211
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Berdasarkan interpretasi terhadap Gambar 1 dan 2, dapat dilakukan analisis perbandingan antara pendekatan teoritis dan kondisi empiris di lapangan. Secara teoritis, dijelaskan bahwa upah riil memainkan peran signifikan dalam memengaruhi keputusan individu untuk masuk ke pasar tenaga kerja. Ketika upah riil berada pada tingkat yang rendah dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, individu cenderung memilih untuk tidak bekerja meskipun terdapat peluang kerja yang tersedia. Hal ini terjadi karena persepsi bahwa imbalan yang diterima tidak sebanding dengan tenaga dan waktu yang dikeluarkan. Sebaliknya, apabila tingkat upah riil terlalu tinggi tanpa dukungan peningkatan produktivitas kerja, perusahaan akan mengalami tekanan biaya yang menyebabkan pengurangan jumlah tenaga kerja untuk menjaga efisiensi operasional. Berdasarkan asumsi tersebut, maka dapat dirumuskan analisis perbandingan sebagai berikut:

Temuan empiris di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara teori ekonomi klasik tentang upah dan kenyataan yang terjadi di beberapa daerah. Sebanyak 14 kabupaten/kota di Sumatera Barat menunjukkan pola yang tidak sepenuhnya sejalan dengan prediksi teori. Sebagai contoh, di Kabupaten Solok terjadi fluktuasi upah riil dari Rp2.104.812 menjadi Rp2.989.480 dan kemudian turun kembali ke Rp2.159.148. Namun, tingkat pengangguran di wilayah ini justru mengalami penurunan signifikan dari 5,62% menjadi 2,58%. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Tanah Datar, yang mencatat perubahan upah riil dari Rp2.422.211 menurun ke Rp1.960.502 dan kembali naik ke Rp2.506.243, disertai dengan penurunan tingkat pengangguran dari 5,66% menjadi 2,22%. Sementara itu, terdapat lima kabupaten/kota yang datanya konsisten dengan teori, salah satunya adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai, di mana upah riil menurun dari Rp2.171.330 ke Rp1.680.427 sejalan dengan penurunan pengangguran dari 7,50% menjadi 6,24%. Pendekatan studi kasus ini digunakan untuk mempersempit fokus analisis, sehingga dapat menghasilkan gambaran yang lebih tajam dan relevan mengenai hubungan antara upah riil dan pengangguran di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Ketidaksesuaian yang ditemukan dalam data lapangan mengindikasikan bahwa relasi antara tingkat upah riil dan pengangguran struktural tidak bersifat deterministik maupun linier. Sebaliknya, hubungan tersebut dipengaruhi oleh beragam variabel lain, seperti mobilitas tenaga kerja, tingkat pendidikan, kebijakan lokal, dan dinamika sektor informal. Oleh karena itu, pendekatan berbasis data empiris melalui penelitian ini menjadi penting guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan realistis mengenai pola interaksi tersebut. Selain memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya kajian tentang dinamika pasar tenaga kerja, hasil penelitian ini juga memiliki implikasi praktis yang signifikan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang kontekstual dan adaptif di tingkat daerah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori untuk mengidentifikasi dan menjelaskan hubungan sebab-akibat antara upah riil sebagai variabel bebas dan tingkat pengangguran struktural sebagai variabel terikat pada level kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 2021 hingga 2023. Penelitian ini dijadwalkan berlangsung selama sebelas bulan, mulai dari Oktober 2024 hingga Agustus 2025, dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber utama. Data yang digunakan berasal dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) serta dokumen resmi terkait lainnya. Data tersebut berbentuk panel, yang menggabungkan aspek time series selama tiga tahun dan cross section dari 19 kabupaten/kota, sehingga menghasilkan total 57 unit observasi [12].

Dalam struktur variabel penelitian, upah riil ditetapkan sebagai variabel independen yang merepresentasikan daya beli riil tenaga kerja. Perhitungan upah riil dilakukan dengan membagi upah nominal terhadap Indeks Harga Konsumen (IHK) dan dikalikan dengan angka indeks 100. Nilai IHK yang digunakan merupakan gabungan data dari dua pusat ekonomi utama di Provinsi Sumatera Barat, yakni Kota Padang dan Kota Bukittinggi, sebagaimana tercantum dalam laporan resmi BPS tahun 2023. Sementara itu, pengangguran struktural dijadikan sebagai variabel dependen yang merujuk pada bentuk pengangguran akibat ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan aktual di pasar kerja [13]. Indikator pengukurannya melibatkan dua komponen utama, yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per kabupaten/kota dan tingkat mismatch pendidikan terhadap kebutuhan lapangan kerja, yang dikaji secara agregat pada level provinsi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai referensi otoritatif, mencakup laporan statistik nasional, jurnal ilmiah, serta dokumen-dokumen kebijakan publik yang berkaitan langsung dengan isu ketenagakerjaan dan pengupahan. Instrumen utama dalam penelitian ini berupa dokumentasi kuantitatif dari sumber data sekunder yang telah melalui proses verifikasi dan validasi. Sebelum dilakukan analisis regresi linier, data terlebih dahulu diuji melalui serangkaian prasyarat statistik, meliputi uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov, uji homogenitas menggunakan Levene's Test, serta uji linearitas untuk memastikan adanya pola hubungan linier antara variabel bebas dan terikat [14]. Setelah seluruh uji asumsi terpenuhi, analisis

DOI: https://doi.org/ 10.31004/riggs.v4i3.2211
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

dilanjutkan dengan regresi linier sederhana yang diformulasikan dalam persamaan $Y = \beta_0 + \beta_1 X + e$, di mana Y menunjukkan tingkat pengangguran struktural, X merepresentasikan upah riil, dan e menggambarkan residual atau pengaruh dari variabel-variabel lain yang tidak diteliti secara langsung [15].

3. Hasil dan Diskusi

3.1. *Hasil*

Uji Prasyarat

Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan mengetahui apakah data dari tiap variabel dalam penelitian memiliki sebaran yang mendekati distribusi normal. Penentuan hasil uji dilakukan berdasarkan nilai signifikansi sebesar 0,05. Jika nilai Sig. lebih dari 0,05, maka data dianggap berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai Sig. berada di bawah angka tersebut, maka data dinilai tidak mengikuti pola distribusi normal.

Tabel 1. Uji Normalitas Data

Tests of Normality			
	Kolmogorov-Smirnov[a]		
	Statistic	df	Sig.
Upah Riil	,112	57	,073
Pengangguran Struktural	,110	57	,083
a. Lilliefors Significance Correction			

Sumber : Data Sekunder Diolah IBM SPSS 21,2025

Berdasarkan pengujian diatas menggunakan kolmogorov-smirnov, upah riil memiliki nilai (Sig.) sebesar 0,073, sedangkan pengangguran struktural memiliki nilai (Sig.) sebesar 0,083. Karena kedua nilai (Sig.) tersebut lebih besar dari batas Sig. 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Artinya, data tersebar secara seimbang dan wajar, sehingga sudah memenuhi persyaratan uji normalitas. Dengan demikian, data tersebut memenuhi asumsi penting untuk melakukan analisis statistik parametrik.

Uji Homogenitas Data

Pengujian homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah sebaran varians dari masing-masing kelompok data dalam penelitian ini bersifat seragam atau tidak. Penentuan hasil uji bergantung pada nilai signifikansi dengan batas toleransi sebesar 0,05. Jika nilai Sig. melebihi angka tersebut, maka data dianggap homogen, menandakan bahwa tidak terdapat perbedaan varians yang signifikan di antara kelompok. Namun, jika nilai signifikansi berada di bawah 0,05, hal ini menunjukkan bahwa data tidak homogen karena terdapat perbedaan varians yang nyata antar kelompok yang dianalisis.

Tabel 2. Uji Homogitas Data

Test of Homogeneity of Variance					
		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Upah Riil	Based on Mean	1,812	2	54	,173
	Based on Median	1,769	2	54	,180
	Based on Median and With Adjusted df	1,769	2	46,708	,182
	Based on Trimmed Mean	1,820	2	54	,172

Sumber: Data Sekunder Diolah IBM SPSS 21,2025

Berdasarkan hasil uji homogenitas yang tercantum nilai signifikansi (Sig.) untuk variabel upah riil yang diuji menggunakan Levene's Test pada pengukuran mean adalah 0,173. Karena nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 (Sig. > 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut bersifat homogen. Hal ini menunjukkan tidak adanya perbedaan varians yang signifikan antar kelompok, sehingga data dianggap seragam dan konsisten. Kondisi homogenitas ini merupakan salah satu persyaratan penting dalam analisis statistik parametrik, guna memastikan bahwa hasil pengujian dapat dipercaya dan diinterpretasikan dengan tepat.

Uji Linearitas

Uji linearitas bertujuan untuk mengevaluasi apakah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat bersifat linear. Keputusan pengujian didasarkan pada nilai signifikansi (P Value) sebesar 0,05 yang terdapat pada bagian

DOI: https://doi.org/ 10.31004/riggs.v4i3.2211
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Deviation from Linearity dalam tabel ANOVA. Apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka hubungan antara variabel dianggap linear, karena tidak terdapat penyimpangan signifikan dari pola garis lurus.

Tabel 3. Uji Linearitas

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Pengangguran Struktural * Upah Riil	Between Groups	(Combined)	26,048	2	13,024	2,396	,101
		Linearity	23,784	1	23,784	4,375	,041
		Deviation from Linearity	2,264	1	2,264	,416	,521
	Within Groups		293,547	54	5,436		
	Total		319,595	56			

Sumber : Data Sekunder Diolah IBM SPSS 21,2025

Berdasarkan Tabel yang memuat hasil uji ANOVA, nilai signifikansi pada bagian deviation from linearity tercatat sebesar 0,521. Karena angka ini melebihi batas signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat penyimpangan signifikan dari pola hubungan linear antara upah riil (X) dan pengangguran struktural (Y). Artinya, hubungan keduanya bersifat linear dan model yang digunakan telah sesuai untuk analisis lanjutan.

Model Regresi Linear Sederhana

Regresi linear sederhana merupakan teknik statistik yang digunakan untuk mengkaji hubungan antara dua variabel, yakni satu variabel independen dan satu variabel dependen. Metode ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana variabel bebas memengaruhi perubahan pada variabel terikat. Dalam konteks penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan bantuan software SPSS untuk memperoleh estimasi model regresi. Hasil analisis dari proses tersebut disajikan pada bagian berikut:

Tabel 4. Model Regresi Linear Sederhana

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	9,441	1,933		4,884	,000
	Upah Riil	-2,242	,000	-,347	-2,748	,008

a. Dependent Variable: Pengangguran Struktural

Sumber : Data Sekunder Diolah IBM SPSS 21,2025

Persamaan regresi ini terdiri dari dua komponen utama yang dapat dijelaskan sebagai berikut: Konstanta atau intercept (β_0) sebesar 9,441 mengindikasikan bahwa jika variabel upah riil (X) diasumsikan bernilai nol, maka tingkat pengangguran struktural (Y) diperkirakan mencapai 9,441 persen. Secara konsep, angka ini menggambarkan kondisi dasar pengangguran struktural tanpa dipengaruhi oleh perubahan pada upah riil.

Sedangkan koefisien regresi untuk variabel upah riil (β_1) yang bernilai -2,242 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada upah riil akan menyebabkan penurunan pengangguran struktural sebesar 2,242 persen. Tanda negatif pada koefisien ini menandakan hubungan negatif atau berlawanan arah antara upah riil dan pengangguran struktural, yang berarti semakin tinggi upah riil pekerja, semakin rendah tingkat pengangguran struktural. Temuan ini didukung oleh nilai signifikansi sebesar 0,008 yang lebih kecil dari batas 0,05, sehingga hubungan tersebut dianggap signifikan secara statistik dan relevan untuk dijadikan dasar dalam kesimpulan penelitian.

Uji Hipotesis

Uji Parsial / Uji t

Uji t merupakan metode statistik yang digunakan untuk menilai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Dalam konteks penelitian ini, uji t bertujuan untuk mengetahui apakah upah riil berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran struktural. Pengujian dilakukan dengan membandingkan dua hipotesis: hipotesis nol (H_0) yang menyatakan tidak ada pengaruh, dan hipotesis alternatif (H_a) yang menyatakan sebaliknya. Keputusan diambil berdasarkan nilai signifikansi (Sig.) dari hasil regresi. Jika nilai Sig.

DOI: https://doi.org/ 10.31004/riggs.v4i3.2211
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

kurang dari atau sama dengan 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti terdapat pengaruh signifikan. Namun, jika nilai Sig. melebihi 0,05, maka H_0 diterima, menandakan bahwa pengaruh tersebut tidak signifikan.

Tabel 5. Uji Parsial

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	**t**	Sig.
1	(Constant)	9,441	1,933		4,884	,000
	Upah Riil	-2,242	,000	-,347	-2,748	,008

a. Dependent Variable: Pengangguran Struktural

Sumber : Data Sekunder Diolah IBM SPSS 21,2025

Temuan ini mengindikasikan bahwa hubungan antara kedua variabel bukanlah kebetulan semata, melainkan didukung oleh bukti empiris yang kuat serta validitas statistik yang tinggi. Dengan demikian, hasil ini memperkuat argumen bahwa perubahan upah riil berperan nyata dalam memengaruhi tingkat pengangguran struktural di masyarakat. Selain itu, keandalan data yang dianalisis dalam rentang kepercayaan 95% memberikan jaminan bahwa hasil tersebut representatif terhadap kondisi sebenarnya di lapangan, sehingga layak dijadikan dasar dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan.

Koefisien Determinasi

Temuan ini menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel tidak terjadi secara kebetulan, melainkan didukung oleh data empiris yang diolah secara sistematis. Validitas statistik yang diperoleh dari pengujian ini semakin memperkuat keyakinan bahwa perubahan upah riil memang memengaruhi dinamika pengangguran struktural di masyarakat. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan yang terpercaya dalam merancang kebijakan ekonomi, khususnya terkait pengelolaan upah dan strategi penanggulangan pengangguran struktural.

Tabel 6. Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,347[a]	,121	,105	2,26041

a. Predictors: (Constant), Upah Riilc

Sumber : Data Sekunder Diolah IBM SPSS 21,2025

Merujuk pada hasil yang ditampilkan nilai koefisien determinasi (R-Square) tercatat sebesar 0,121. Hal ini berarti bahwa sekitar 12,1% variasi pada tingkat pengangguran struktural dapat dijelaskan oleh variabel upah riil sebagai faktor independen dalam model regresi. Dengan demikian, pengaruh upah riil terhadap pengangguran struktural tergolong relatif kecil. Sisanya, yakni sebesar 87,9%, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini, seperti tingkat pendidikan tenaga kerja, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta perkembangan teknologi dan otomatisasi yang juga berperan dalam perubahan struktur pasar kerja. Nilai R-Square sebesar 0,121 ini dikategorikan rendah atau lemah, karena berada di bawah ambang batas 0,25 yang umumnya dijadikan acuan untuk menilai kekuatan kontribusi variabel bebas dalam regresi linier. Meskipun demikian, hasil ini memberikan gambaran awal bahwa upah riil tetap memiliki peran, meskipun tidak dominan, dalam menjelaskan variasi pengangguran struktural, serta membuka peluang untuk menggali faktor-faktor lain pada penelitian selanjutnya.

3.2. Diskusi

Fokus utama dari penelitian ini adalah menguji keterkaitan antara tingkat upah riil dan tingkat pengangguran struktural yang terjadi di wilayah kabupaten/kota dalam lingkup Provinsi Sumatera Barat. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel upah riil dan pengangguran struktural, yang mengindikasikan bahwa hipotesis penelitian dapat diterima. Dengan demikian, hipotesis nol (H_0) ditolak, sementara hipotesis alternatif (H_a) diterima sebagai bukti empiris. Pengaruh signifikan ini dijelaskan melalui mekanisme ekonomi di mana peningkatan upah riil mampu meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya para pekerja. Meningkatnya daya beli ini kemudian memicu permintaan agregat terhadap barang dan jasa, yang

DOI: https://doi.org/ 10.31004/riggs.v4i3.2211
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

selanjutnya mendorong pelaku usaha untuk memperbesar kapasitas produksi dan membuka lebih banyak peluang kerja. Proses ini berkontribusi pada penurunan angka pengangguran struktural secara bertahap.

Kendati demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa rata-rata tingkat upah riil di wilayah Sumatera Barat masih berada di bawah standar dibandingkan dengan beberapa provinsi lain di Pulau Sumatera. Perbedaan ini menjadi faktor pembatas dalam upaya peningkatan kesejahteraan tenaga kerja di wilayah tersebut. Rendahnya upah dapat menurunkan motivasi kerja masyarakat, bahkan dalam kondisi ketersediaan lapangan kerja yang memadai. Kurangnya insentif finansial akibat rendahnya upah riil menyebabkan sebagian tenaga kerja memilih untuk tidak bekerja atau keluar dari pasar tenaga kerja. Akibatnya, angka pengangguran struktural bisa tetap tinggi meskipun secara teoritis seharusnya menurun dengan adanya pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya mempertahankan kestabilan upah, tetapi juga melakukan upaya konkret dalam menaikkan upah riil secara bertahap. Langkah ini penting guna memperkuat daya beli dan menggerakkan kembali partisipasi angkatan kerja, sehingga penurunan pengangguran struktural dapat berlangsung lebih cepat dan berkelanjutan.

Hasil temuan ini konsisten dengan sejumlah studi sebelumnya yang telah menyoroti peran krusial upah riil dalam dinamika pasar tenaga kerja. Misalnya, penelitian oleh Tarsidin (2022) serta Loura dan Agusalim (2023) menunjukkan adanya korelasi negatif yang signifikan antara upah riil dan tingkat pengangguran. Kedua studi tersebut menjelaskan bahwa upah riil yang lebih tinggi dapat mengurangi pengangguran, termasuk dalam kategori pengangguran struktural dan pengangguran yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini menunjukkan bahwa upah bukan hanya sekadar insentif ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk menyesuaikan distribusi tenaga kerja dengan kebutuhan aktual dunia usaha. Oleh karena itu, temuan dalam penelitian ini memperkuat bukti bahwa upah riil yang memadai dapat berperan sebagai katalisator dalam mengatasi permasalahan struktural di sektor ketenagakerjaan.

Berdasarkan hasil analisis dan temuan empiris tersebut, terdapat beberapa implikasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat. Pertama, rendahnya tingkat upah riil mendorong sebagian masyarakat untuk tidak aktif dalam pasar tenaga kerja, meskipun peluang kerja tersedia. Oleh karena itu, peningkatan upah riil dapat menjadi pendorong utama bagi masyarakat untuk kembali memasuki pasar kerja dan berkontribusi terhadap produktivitas regional. Kedua, hubungan negatif yang ditemukan antara upah riil dan pengangguran struktural mengindikasikan bahwa persoalan pengangguran tidak hanya disebabkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya daya beli yang diperoleh dari pendapatan kerja. Ketiga, dengan meningkatkan upah riil, pemerintah dapat mempercepat proses penyerapan tenaga kerja, terutama pada kelompok masyarakat yang sebelumnya enggan bekerja karena upah yang dianggap tidak layak. Ketiga implikasi ini menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan perlu dipandang sebagai strategi struktural yang integral dalam upaya mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan memperhatikan keseluruhan temuan, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh signifikan antara upah riil dan tingkat pengangguran struktural terbukti secara empiris. Kenaikan upah riil terbukti mampu menurunkan angka pengangguran struktural, sebagaimana yang dijelaskan oleh teori ekonomi neoklasik, yang menyatakan bahwa upah memainkan peran penting dalam menyeimbangkan pasar tenaga kerja. Selain itu, temuan ini juga diperkuat oleh berbagai penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa upah yang lebih tinggi dapat memperbaiki efisiensi pasar tenaga kerja, mengurangi mismatch antara penawaran dan permintaan tenaga kerja, serta meningkatkan partisipasi angkatan kerja. Oleh karena itu, intervensi kebijakan yang diarahkan pada peningkatan upah riil patut diprioritaskan dalam agenda pembangunan ekonomi daerah.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data empiris terkait pengaruh upah riil terhadap pengangguran struktural di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat selama periode 2021–2023, ditemukan adanya hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Nilai signifikansi sebesar 0,008 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 mengindikasikan bahwa hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa upah riil berpengaruh secara signifikan terhadap pengangguran struktural. Secara teoritis, temuan ini mendukung pandangan bahwa perubahan daya beli riil tenaga kerja dapat memengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja, terutama ketika terdapat mismatch antara keterampilan pekerja dan kebutuhan pasar.

Namun demikian, kontribusi upah riil terhadap pengangguran struktural tergolong rendah. Hal ini tercermin dari nilai koefisien determinasi (R-Square) sebesar 0,121, yang berarti bahwa hanya 12,1% variasi dalam pengangguran struktural dapat dijelaskan oleh variabel upah riil, sedangkan 87,9% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Faktor-faktor tersebut kemungkinan meliputi tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi regional (PDRB), perkembangan teknologi, dan efektivitas kebijakan ketenagakerjaan di daerah. Oleh karena itu, penelitian

DOI: https://doi.org/ 10.31004/riggs.v4i3.2211
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

mendatang dianjurkan untuk memasukkan variabel-variabel tersebut guna memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pengangguran struktural di wilayah ini.

Referensi

[1] Suparmono, "Pengantar ekonomi makro," *Terjem. Chriswan Sungkono. Jakarta Salemba Empat*, p. 262, 2023, [Online]. Available: https://repository.stimykpn.ac.id/246/1/6.Buku Pengantar Ekonomi Makro.pdf
[2] B. Pusat Statistik, "Panduan penggunaan Sakernas: Survei Angkatan Kerja Nasional," *BPS*, 2021.
[3] I. Suaidah and H. Cahyono, "Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran," *J. Adm. Bisnis*, vol. 3, no. 1, pp. 93–94, 2020.
[4] Siti Kharisatul Ulya, Rindiani Rindiani, Gustina Masitoh, Chika Dwi Oktaviani, and Aditya Reza Rezola, "Analisis Pengaruh Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Indonesia," *GEMILANG J. Manaj. dan Akunt.*, vol. 5, no. 3, pp. 100–123, 2025, doi: 10.56910/gemilang.v5i3.2171.
[5] S. C. . Todaro, M. P., & Smith, *Buku Pembangunan Ekonomi (Edisi ke-12)*. Boston: Pearson Education, 2015.
[6] Boediono, *Buku Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFE, 2002.
[7] B. Pusat Statistik, "Statistik perkembangan ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Selatan periode Agustus 2017 hingga 2021," *BPS*, 2022.
[8] Tarsidin/bemp.v11i3.336, "Studi tentang pengangguran struktural: Faktor penyebab dan dinamika," *Bul. Ekon. Monet. dan Perbank.*, vol. 11, no. 3, pp. 1–18, 2009, doi: https://doi.org/10.21098/bemp.v11i3.336.
[9] N. G. Mankiw, *Pengantar Ekonomi Makro (Edisi ke-7)*. Jakarta: Selemba Empat, 2018.
[10] Sukirno, *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
[11] Sadono, *Dasar-dasar Teori Mikroekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
[12] M. Nazir, *Buku Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014.
[13] P. G. & S. Irawan, *Studi Ekonomi Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: BPFE, 2002.
[14] L. Ghozali, *Penerapan Analisis Multivariat menggunakan IBM SPSS versi 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.
[15] D. N. Gujarati, *Pengantar Ekonometrika*. New York: McGraw-Hill, 2012.

DOI: https://doi.org/ 10.31004/riggs.v4i3.2211
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)